

KOTA MADIUN TAK PUNYA SDA

Maju Pesat dengan Leadership dan Mindset Melayani

KOTA Madiun Jawa Timur tidak mempunyai Sumber Daya Alam (SDA), namun dengan leadeship yang baik dan mindset melayani mampu melesat dan banyak prestasi. Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun sehingga mampu berubah menuju kemajuan pesat inilah yang menjadikan tujuan studi banding DPRD Kabupaten Kulonprogo bersama beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang bertepatan "Inovasi Kebijakan Penganggaran Bidang Infrastruktur Pariwisata, UMKM, dan Tata Ruang Guna Peningkatan PAD" ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo Akhid Nuryati SE dibersamai Ketua Komisi dan Fraksi serta Sekretaris DPRD beserta jajaran.

Sedangkan dari OPD terdiri Kepala Bappeda, Kepala Dinas (Kadinas) PUPR, Kadinas Tata Ruang, Kadinas Koperasi dan

UKM, Direktur PDAM, Kepala BKAD, Kadinas Dispar, Asisten Perekonomian, dan Pembangunan, serta Persatuan Wartawan Kulonprogo (PWK). Rombongan diterima Asisten I dan II Pemkot Madiun beserta OPD di Balai Kota, serta di DPRD Madiun.

Dikatakan Akhid Nuryati, pihaknya memilih Kota Madiun sebagai lokasi kunjungan karena wilayah Madiun dinilai mengalami perkembangan yang luar biasa. Perkembangan pembangunan juga memberikan manfaat bagi masyarakatnya

"Secara PAD kondisi antara Kota Madiun dan Kulonprogo tidak terlalu jauh, tetapi pemanfaatannya menjadi berbeda karena jumlah penduduk Kulonprogo lebih banyak. Penduduk Kulonprogo sekitar 447 ribu jiwa, atau sekitar 2 kali lipat Madiun," ungkapnya.

Leadership yang Menggerakkan

Di Kota Madiun ini, menurut Akhid, ada dua hal besar yang



Salah satu sudut Kota Madiun.

perlu dicatat. Pertama, adanya keteladanan/leadership dari kepala daerah memimpin wilayah itu sangat menentukan kemajuan. Digerakkan dan diberi contoh oleh walikota, sehingga perkembangannya luar biasa. Kedua, mindset dari biro-

krasi yang betul-betul sebagai pelayan dan tidak mengambil gap atau jarak dengan masyarakat/bawahannya. "Padahal dulu Kota Madiun tidak ada yang melirik, kumuh, banjir, masih mendinding Kabupaten Madiun. Namun saat ini secara

signifikan melesat menjadi seperti sekarang," ucap Akhid.

Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Pemkot Madiun, Drs Ahsan Sri Hasto merespon positif kunjungan studi banding dari DPRD Kulonprogo. "Kota Madiun menja-

di salah satu daerah otonom yang mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena merupakan pintu masuk ke Jawa Timur dari arah barat," ucapnya.

Dijelaskan, Kota Madiun sama sekali tidak mempunyai SDA. Dulu terkenal disingkiri, tetapi Pak Wali dapat merubah menjadi tempat yang harus di ampiri/disinggahi. Dengan "Madiun Maju Mendunia", bagaimana daerah-daerah sekitar itu menjadi tertarik ke Kota Madiun, yang ada akhirnya tempat-tempat wisata bisa mendongkrak secara otomatis.

Pemikiran walikota merubah dari kota disingkiri menjadi kota diampiri diantaranya dengan mengusung 6 negara, yakni adanya galeri seperti replika/miniatu Menara Eiffel ikon Perancis, Patung Merlion ikon Singapura, miniatur kabah, Big Ben ikon London, Kincir Angin ikon Belanda, dan patung Liberty ikon Amerika Serikat. Dan ini menjadi tren. (Wid/Rul) bersambung

Muhtarom Asrori SH Dilantik Sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kulonprogo

PENGASIH (KR) - Muhtarom Asrori SH dilantik sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kulonprogo masa jabatan 2019-2024 pada Rapat Paripurna, Senin (13/5), di Ruang Kresna Gedung DPRD Kulonprogo. Muhtarom Asrori menggantikan H Ponimin SE MM karena meninggal dunia.

Selain Penggantian Antarwaktu Wakil Ketua, DPRD Kulonprogo juga melakukan pelantikan Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kulonprogo atas nama Sumarningsih. Ia menggantikan H Ponimin SE MM karena meninggal dunia.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 164/KEP/2024 tentang peresmian pemberhentian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo. Isinya, pemberhentian dengan hormat H Ponimin SE MM sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kulonprogo dan ucapan terima kasih atas pengabdian.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 165/KEP/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo. Isinya, mengangkat Muhtarom Asrori SH sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo.



Prosesi pelantikan Penggantian Wakil Ketua DPRD Kulonprogo oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates.

Pengucapan sumpah/janji Penggantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo, Muhtarom Asrori di-pandu Ketua Pengadilan Negeri (PN) Wates Jeni Nugraha Julius SH MHum. Sedang pengucapan sumpah/janji Pengganti Antarwaktu anggota DPRD Kulonprogo, Sumarningsih di-pandu Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati SE.

Akhid meyakini kehadiran Muhtarom di jajaran pimpinan DPRD Kulonprogo bisa memberikan energi tambahan. Terutama dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan yang harus rampung sebelum akhir jabatan.

Ia juga optimis berbagai pekerjaan yang masih tersisa bisa selesai dalam waktu 3 bulan hingga akhir masa jabatan. Serta sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

"Kehadiran Pak Muhtarom tentu sangat membantu

kami di jajaran pimpinan DPRD Kulonprogo," ucap Akhid.

Muhtarom Asrori mengatakan bangga setelah dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Kulonprogo. Tugas yang akan dilaksanakan merupakan amanah dan harus dilaksanakan dengan baik. Muhtarom menambahkan dirinya tinggal melanjutkan tugas H Ponimin yang belum selesai. "Saya bersama dengan anggota DPRD Kulonprogo bisa melanjutkan apa yang belum dipu-tuskan," kata Muhtarom.

Lebih lanjut Muhtarom mengatakan waktu menjabat yang tinggal tiga bulan tidak ada prioritas. Namun dirinya bersama dengan anggota yang lain akan menyelesaikan tentang perubahan-perubahan.

"Mudah-mudahan, berkat doa masyarakat Kulonprogo tugas-tugas tersebut bisa diselesaikan," ujarnya. (Wid)

PENDAPATAN RETRIBUSI RP 543,72 JUTA 49.350 Wisatawan Kunjungi Gunungkidul



KR-Endar Widodo

Wisatawan menikmati liburan akhir pekan di Pantai Gunungkidul.

WONOSARI (KR) - Selama Libur Kenaikan Isa Almasih dan cuti bersama, sebanyak 49.350 wisatawan mengunjungi Kabupaten Gunungkidul.

Sebagian besar mereka datang dari Jawa Tengah, Solo Raya dan sekitarnya. Selain juga sebagian lain datang dari Jawa Timur dan Jawa Barat.

Adapun lokasi banyak dikunjungi antara lain, pantai Kukup,

Sadranan, Pulang Syawal dan sekitarnya. Selama tiga hari tersebut pendapatan retribusi mencapai Rp 543.721.600,-

"Kunjungan wisatawan hari Minggu (12/5) belum diketahui, angkanya baru akan terekam setelah pukul 19.00," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Oneng Windu Wardana SSi MSi, Minggu (12/5).

Kunjungan wisatawan terbanyak pada hari Sab-

tu (11/5) sebanyak 21.513 orang dengan jumlah pendapatan Rp 247.474.800,-

Urutan kedua hari Kamis (9/5), jumlah pengunjung sebanyak 15.574 wisatawan dengan pendapatan Rp 171.774 orang dan Jumat (10/5) dikunjungi sebanyak 12.263 orang dengan pemasukan Rp 124.475.800,-

Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan selanjutnya, Dinas Pariwisata terus berusaha meningkatkan fasilitas wisata, kerja sama dengan pihak lain agar tidak terjadi kemacetan dan meningkatkan pengawasan terhadap penarikan retribusi.

Sebelum ditambah pendapatan liburan akhir pekan ini, jumlah pendapatan wisata tahun ini sebesar Rp 8,9 miliar. Jumlah ini sudah mencapai 31,3 persen persen dari target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 28,4 miliar. (Ewi)

DIDUGA PALSU

Pupuk Nonsubsidi Harga Murah Beredar di Ngawen

WONOSARI (KR) - Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul meminta masyarakat khususnya petani untuk mewaspadai peredaran pupuk di pasaran diduga palsu. Peredaran pupuk yang mencurigakan dan diduga palsu tersebut terjadi di Kapanewon Ngawen jenis pupuk nonsubsidi dengan dibanderol harga murah.

Saat ini, sampel pupuk tersebut sudah diamankan untuk dilakukan uji laboratorium milik Kementerian Pertanian.

Kepala DPP Gunungkidul, Rismiyadi mengatakan pihaknya mendapat informasi peredaran pupuk tersebut pada pekan lalu.

"Diduga pupuk nonsubsidi tersebut dijual ke berbagai daerah menggunakan mobil pick up. Selain itu, dakam kemasan terdapat tulisan

atau palsu kami menunggu hasil uji laboratorium dan saat ini baru dugaan," katanya.

Pupuk yang beredar di Kapanewon Ngawen arau perbatasan antara Gunungkidul dengan Propinsi Jawa Tengah tersebut tidak mencantumkan secara tegas jenis pupuk NPK tetapi mencantumkan merek dan perusahaan pupuk tertentu.

Selain itu, dakam kemasan terdapat tulisan

produksi Gresik, Jawa Timur.

Untuk harga normal pupuk bersubsidi jenis Urea dari distributor resmi dibanderol Rp 2.250 per kilogram (kg) dan NPK Rp 2.300 per kg. Kedua jenis pupuk tersebut biasa dijual dalam kemasan per 50 kg. Sedangkan, harga pupuk non subsidi yang dijual di Ngawen dengan harga bervariasi mulai dari Rp 150.000 dan Rp 250.000.

Pupuk tersebut juga dapat ditawarkan dan tidak ada penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Penjual yang disinyalir mengedarkan menggunakan dua mobil pick up bernopol Jawa Timur," imbuhnya.

Lurah Kampung, Ngawen, Gunungkidul Supar-

na mengatakan informasi peredaran pupuk yang diduga palsu tersebut berawal saat salah satu pemilik toko pertanian mendapat informasi dari warga yang membeli pupuk murah yang dijual oleh seseorang menggunakan pikap.

Dalam menawarkan kepada warga penjual pupuk diduga palsu ini turun dari mobil dan menawarkan kepada warga pupuk jenis NPK Mutiara dengan harga sangat murah. Dari temuannya di lapangan terdapat salah satuarganya yang membeli sampai empat karung.

Terkait hal tersebut pihaknya meminta DPP mengambil langkah agar masyarakat tidak menjadi korban peredaran pupuk palsu. (Bmp)

TINGKATKAN KETERAMPILAN

Dharma Wanita Dilatih Pembuatan Jamu

WONOSARI (KR) - Mendorong keterampilan, Dharma Wanita Persatuan Gunungkidul mengikuti bimbingan teknis (bimtek) jamu tradisional di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Gunungkidul.

Melalui program ini sebagai bentuk pelatihan pengembangan, agar jamu tradisional semakin meningkat. Peserta juga dilatih bagaimana proses pembuatan jamu tradisional.

"Bimtek ini untuk memberikan keterampilan serta pengetahuan tentang

jamu tradisional. Sehingga peserta dapat mengembangkan keberadaan jamu tradisional," kata Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Gunungkidul Agus Mantara MM, Senin (13/5).

Pelaksanaan bimtek dilakukan baik secara teori maupun praktik pembuatan jamu. Mulai dari penyiapan bahan, menyusun materi pembuatan jamu dan tentang pembuatan jamu tradisional. Sehingga para peserta dapat mengetahui dari awal hingga proses pembuatan jamu. Diungkapkan, potensi



KR-Dedy EW

Pelatihan pembuatan jamu tradisional.

mengembangkan jamu tradisional juga terbuka. Artinya dengan pelatihan ini peserta akan memiliki pengetahuan dan keter-

ampilan tentang pembuatan jamu. Karena setiap jamu tradisional ini memiliki manfaat tersendiri. (Ded)

MEMENUHI KEBUTUHAN LAPANGAN KERJA

Disnakertrans Tingkatkan Kualifikasi Canaker

WATES (KR) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo berupaya agar para calon tenaga kerja memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan perusahaan.

Langkah tersebut diambil untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang saat ini semakin luas. Apalagi dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).

"Kami berupaya agar para pencari kerja dari Kulonprogo mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Seperti memberikan berbagai pelatihan bagi calon tenaga kerja dan bekerja sama dengan lembaga pel-

atihan," kata Kepala Disnakertrans setempat, Bambang Sutrisno, belum lama ini.

Menurutnya status YIA sebagai bandara internasional menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk membuka usahanya di Kabupaten Kulonprogo. Sehingga kondisi tersebut membuka kesempatan bagi para calon pekerja lokal untuk bekerja.

Bambang Sutrisno mengakui hingga saat masih ada sejumlah kendala dalam optimalisasi serapan tenaga kerja. Salah satunya kesenjangan antara kondisi pencari kerja dengan lowongan yang dise-

diakan. "Lowongan pekerjaan ada, tapi karena kompetensi pencari kerjanya belum sesuai membuat mereka sulit diterima," jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkan, Disnakertrans sudah intens menjalin komunikasi dengan berbagai perusahaan di kabupaten ini. Komunikasi dimaksud untuk mencari tahu tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan sehingga pihaknya bisa menyiapkan calon pekerja.

"Jadi nanti bisa merekrut tenaga kerja sesuai lowongan kerja yang disediakan oleh pihak perusahaan yang membutuhkan," tuturnya. (Rul)

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati SE, status internasional YIA sebagai peluang yang cukup menjanjikan. Tidak hanya sebatas bagi para tenaga kerja tapi juga pelaku UMKM. Akhid berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo jeli melihat peluang tersebut. Termasuk memanfaatkannya untuk meningkatkan kelas produk UMKM lokal dengan menampilkan di YIA.

"Harus diupayakan agar produk UMKM Kulonprogo yang dipajang di YIA bisa laku. Untuk itu perlu upaya pemasaran yang lebih optimal," tuturnya. (Rul)